

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk hidup setiap harinya tentu memproduksi sampah, baik yang bersifat organik maupun anorganik. Sampah dapat diartikan sebagai sisa dari suatu materi yang tidak terpakai dan keberadaannya sudah tidak diinginkan kembali, baik untuk individu, rumah tangga, maupun organisasi. Suyoto (2008) mendefinisikan sampah seperti material sisa yang berasal dari keseharian kegiatan masyarakat yang tidak mempunyai nilai, serta membutuhkan proses yang sulit untuk dapat digunakan kembali dan mempunyai nilai. Dalam kehidupan sehari-hari, sampah merupakan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat dan belum dapat teratasi dengan baik. Adanya sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah mengakibatkan kurangnya perhatian terkait dampak yang akan ditimbulkan dari sampah tersebut. Sampah yang tidak terkelola dengan optimal dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan setiap individu dan juga menyebabkan pencemaran udara (Hardiatmi, 2011).

Sampah yang tidak terkelola dengan optimal juga dapat mengakibatkan munculnya berbagai kerusakan alam, seperti iklim yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi (Soegianto dalam Hardiatmi, 2011). Keberadaan sampah yang semakin hari semakin bertambah tentu dapat mengganggu keindahan lingkungan sekitar. Permasalahan sampah tersebut tentu perlu mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat agar tidak mengakibatkan dampak negatif yang berkepanjangan.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2011) bahwa saat ini terdapat fenomena yang terjadi pada masyarakat, yakni masyarakat belum sepenuhnya dapat memaknai sampah sebagai sesuatu yang bernilai jual, padahal sampah tersebut dapat didaur ulang.

Badan Pusat Statistik atau BPS (2022) melaporkan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menangani sampah di Indonesia mengalami peningkatan jumlah sampah, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Sampah di Indonesia Tahun 2020-2022**

Tahun	Jumlah Sampah (Volume)
2020	67,8 juta Ton
2021	68,5 juta Ton
2022	70 juta Ton

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, terlihat bahwa sampah yang ditangani oleh TPA di Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Faridah dan Nurlina (2023: 36) bahwa melonjaknya volume sampah tidak diimbangi oleh lahan yang dapat menampung keberadaan sampah serta minimnya pengetahuan dan edukasi atau pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan dapat menghasilkan nilai jual.

Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisasi dan menangani sampah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan

tersebut mengatur mengenai dimensi tempat pengolahan sampah yang sesuai dengan prinsip 3R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* atau disebut TPS 3R sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaurulangan skala kawasan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Candrakirana (dalam Hardiatmi, 2011) yang menyatakan bahwa aturan perundang-undangan tersebut pada realitanya belum dapat dijalankan secara maksimal karena masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah terpencil masih dihadapkan oleh beberapa kendala dalam menangani tumpukan sampah.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi padat penduduk sehingga hal tersebut berpengaruh pada tingginya sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Open Data Jabar* (2021), menyebutkan bahwa terdapat 15,735 ton sampah yang diproduksi di wilayah Jawa Barat. Sampah-sampah yang terdapat di Provinsi Jawa Barat umumnya bersumber dari keseharian masyarakat di dalam rumah tangga, perkantoran, pasar tradisional, mal, fasilitas publik, kawasan, dan sebagainya. Adapun jumlah sampah selama 3 (tiga) tahun terakhir di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Sampah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah Sampah (Volume)
2019	913, 1 Ton/hari
2020	944,7 Ton/hari
2021	586,7 Ton/hari

(Sumber: *Open Data Jabar*, 2021)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir jumlah sampah di Provinsi Jawa Barat bersifat fluktuatif. Dalam kurun waktu 2019-2020, rata-rata

jumlah produksi sampah terus mengalami peningkatan pada 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Jumlah sampah yang meningkat secara signifikan terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 944,7 ton/hari. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pengaruh pandemi Covid-19 sehingga terjadi perubahan pola konsumsi pada masyarakat dan mengakibatkan timbulan sampah di Provinsi Jawa Barat semakin meningkat. Akan tetapi, jumlah sampah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 586,7 ton/hari. Jumlah tersebut berkurang sebesar 38% dibandingkan dengan rata-rata timbulan sampah harian tahun 2020. Namun, Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih tercatat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki timbulan sampah terbanyak.

Peningkatan timbulan sampah yang terjadi setiap tahunnya menjadi kekhawatiran di wilayah Jawa Barat sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyadari terkait dengan keberadaan sampah yang semakin menumpuk dan harus dikelola dengan baik. Di Provinsi Jawa Barat, salah satu wilayah yang memiliki permasalahan mengenai sampah, yaitu Kota Depok.

**Tabel 1.3**  
**Data Timbulan Sampah di Kota Depok Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Timbulan (ton)</b>
2019	553,449.64
2020	472,854.23
2021	479,660.75

(Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023 (diolah))

Berdasarkan tabel 1.3. menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kota Depok selama 3 (tiga) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Timbulan sampah di Kota Depok pada tahun 2019 mencapai 553,449.64 ton/tahun. Kemudian, terjadi penurunan

timbulan sampah di Kota Depok pada tahun 2020 menjadi 472,854.23 ton/tahun. Namun, pada tahun 2021, timbulan sampah di Kota Depok kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 479,660.75 ton/tahun. Jumlah atau timbulan sampah tersebut diperkirakan mengalami peningkatan di tahun yang akan datang. Adanya timbulan sampah ini disebabkan oleh banyaknya sampah yang dihasilkan dari keseharian kegiatan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah di Kota Depok cukup besar serta dapat menimbulkan permasalahan atau dampak yang berkepanjangan apabila tidak teratasi dan terkelola dengan baik.

Mengelola sampah yang baik dan benar perlu dilakukan dengan memperhatikan jenis-jenis sampah yang banyak diproduksi oleh masyarakat agar pengelolaan sampah tersebut dapat tepat sasaran dan dapat ditentukan skala prioritas penanganan sampah yang ada. Berikut ini, tabel 1.4. menunjukkan kategori sumber-sumber sampah yang dihasilkan di Kota Depok.

**Tabel 1.4**  
**Sumber-Sumber Sampah di Kota Depok Tahun 2019-2021**

<b>Sumber Sampah</b>	<b>Tahun 2019 (ton)</b>	<b>Tahun 2020 (ton)</b>	<b>Tahun 2021 (ton)</b>
Rumah Tangga	156.20	156.20	156.20
Perkantoran	7.40	7.40	7.40
Pasar	104.20	104.20	104.20
Perniagaan	29.80	29.80	29.80
Fasilitas Publik	409.20	409.20	409.20
Kawasan	22.30	22.30	22.30

(Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2023 (diolah))

Tabel 1.4 tersebut menunjukkan bahwa sumber-sumber sampah yang terdapat di Kota Depok beraneka ragam. Sampah-sampah tersebut dikelompokkan menjadi 6 (enam) sumber sampah seperti yang terdapat di dalam tabel. Berdasarkan keenam

sumber sampah tersebut, sampah yang berasal dari rumah tangga merupakan sampah penyumbang terbesar bagi timbulan sampah di Kota Depok.

Menurut Hasibuan (2016: 42), sampah rumah tangga adalah sampah yang bersumber dari keseharian masyarakat di dalam lingkup keluarga yang tidak meliputi sampah khusus atau spesifik. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa sampah rumah tangga sebagai sampah yang sudah tidak terpakai kembali, tidak diharapkan, serta dianggap tidak memiliki nilai guna atau manfaat. Dalam hal ini, banyaknya sampah dapat ditentukan dari jumlah rumah tangga yang ada. Sampah rumah tangga juga dinilai sebagai permasalahan yang serius karena menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di lingkungan sehingga diperlukan penanganan yang tepat untuk meminimalisasi sampah tersebut.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Bella., Widowati., dan Maesaroh (2022) bahwa untuk meminimalisasi permasalahan sampah yang terus menumpuk dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar perlu dilakukan agar dapat meminimalisasi tumpukan sampah dan memiliki nilai guna.

Gitosaputro dan Rangga (2015) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat agar dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga mampu untuk memecahkan suatu permasalahan dan secara mandiri dapat menentukan keputusan. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, salah satu cara yang efektif untuk meminimalisasi

penumpukan sampah dengan memberikan pembinaan berupa edukasi yang sesuai dengan perundang-undangan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariany dkk., (2019) bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program edukasi dan pendampingan dinilai mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara mengelola sampah yang baik untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya partisipasi penuh dari masyarakat dalam mengelola sampah tentu memerlukan antusiasme yang besar. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, penyediaan fasilitas bank sampah menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan.

Sistem pengelolaan sampah yang secara kolektif dilakukan melalui bank sampah akan dapat menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah agar memiliki nilai jual (Yayasan Unilever Indonesia, 2013). Pengelolaan sampah menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dipahami sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian, Pasal 1 butir 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah menyatakan bahwa bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*, serta sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi

Sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Sampah yang dikelola melalui bank sampah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi permasalahan sampah yang bekerja sama dengan masyarakat dan area pelayanan mencakup wilayah administratif setingkat RT, RW, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Adapun persyaratan untuk mendirikan atau membangun bank sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 11 butir 2 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, antara lain:

- a. Mempunyai sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah.
- b. Dilengkapi dengan label atau penanda pada sarana pengelompokkan sampah.
- c. Luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan.
- d. Lokasi mudah diakses.
- e. Tidak mencemari lingkungan.
- f. Mempunyai sarana pengolahan sampah, dan
- g. Mempunyai alat transportasi pengumpulan sampah.

Persyaratan untuk mendirikan atau membangun bank sampah juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah bahwa untuk mendirikan bank sampah perlu memperhatikan beberapa hal, seperti adanya pengurus bank sampah, mendapat izin atau dukungan



dari pemerintah daerah dan masyarakat, gudang sampah yang dapat digunakan untuk keberjalanan pengelolaan sampah, terdapat timbangan sampah, buku tabungan, serta karung untuk memilah sampah.

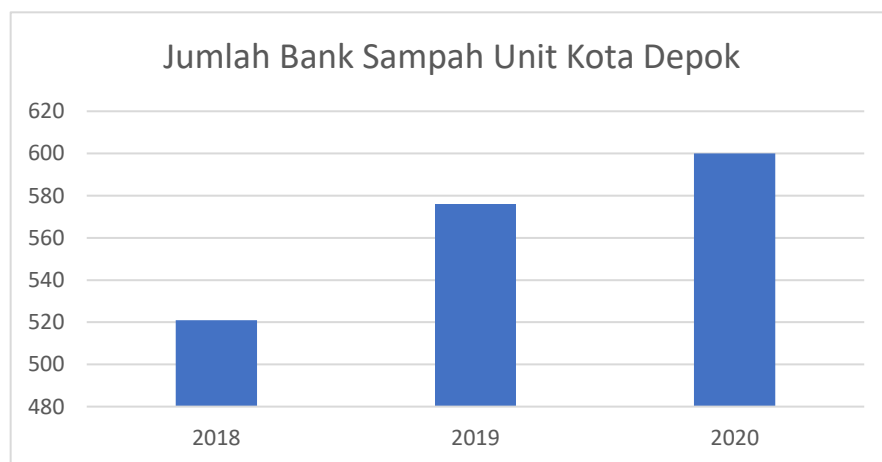
Kota Depok sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengembangan sistem persampahan kota. Berdasarkan data yang didapatkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2020, sampah yang ditimbun di Kota Depok berjumlah 1,295 ton/hari serta sampah yang dikelola dengan memilah sampah, mengompos, dan memberikan sisa sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung berjumlah 1,033 ton/hari. Pada tahun 2021, jumlah sampah yang ditimbun di Kota Depok berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), yakni sebesar 1,314 ton/hari. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sampah yang terdapat di Kota Depok belum dapat ditangani secara keseluruhan sehingga menimbulkan penumpukan sampah di beberapa tempat yang terdapat di Kota Depok. Untuk mengurangi penumpukan sampah maka dibentuk bank sampah berbasis pemberdayaan masyarakat agar sampah yang ada dapat memiliki manfaat.

Kota Depok telah berupaya menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah sebagai langkah untuk menyadarkan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan juga sebagai strategi pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat agar memperoleh keuntungan ekonomi melalui bank sampah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Berita Depok (2023), terdapat 340 bank sampah aktif dari total 920 Rukun Warga (RW) di Kota Depok. Bank sampah

yang terdapat di Kota Depok tersebut sebagian besar tersebar di Kecamatan Sukmajaya.

Kota Depok memiliki induk bank sampah yang mencakup beberapa bank sampah unit.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Bank Sampah Unit di Kota Depok**



(Sumber: DLHK Kota Depok dalam Hidayah dkk., 2022)

Berdasarkan gambar 1.1, diketahui bahwa setiap tahunnya Kota Depok mengalami penambahan jumlah bank sampah unit, yaitu terdapat 521 bank sampah unit aktif pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan menjadi 576 bank sampah unit aktif pada tahun 2019. Kemudian, jumlah bank sampah unit di Kota Depok yang tersebar pada 11 kecamatan mencapai 600 bank sampah unit aktif pada tahun 2020. Keberadaan bank sampah di Kota Depok tersebut, diharapkan masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap bank sampah untuk mengelola sampah yang dimiliki dan agar dapat terwujud masyarakat yang berdaya.

Salah satu bank sampah di Kota Depok yang mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat, yaitu Bank Sampah Induk Rumah Harum. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum yang terletak di RT 05, RW 01, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Bank Sampah Induk Rumah Harum merupakan organisasi pengelola sampah yang diresmikan pada 23 Juni tahun 2013. Bank sampah ini mengusung konsep *zero waste* yang di dalamnya memiliki beberapa program untuk memberikan solusi yang bermanfaat bagi alam dan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat melalui kegiatan perubahan sampah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual.

Terdapat 94 (sembilan puluh empat) bank sampah unit aktif yang berada di bawah tanggung jawab Bank Sampah Induk Rumah Harum dan tersebar di beberapa daerah Kota Depok dengan total nasabah di bank sampah unit mencapai 3.210 orang. Untuk nasabah perseorangan yang dimiliki Bank Sampah Induk Rumah Harum mencapai 634 orang. Dalam keberjalanannya, Bank Sampah Induk Rumah Harum mendapatkan dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, serta sebagian kemitraan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti Nutrifood, Garuda, Indofood, dan sebagainya. Dukungan yang diberikan tersebut berfokus pada penanganan masalah pengelolaan sampah, terutama berkaitan dengan sampah yang bersumber dari rumah tangga. Bank Sampah Induk Rumah Harum berfungsi sebagai penampungan akhir untuk bank sampah unit yang bermitra dan kemudian akan dipilah serta dikelola oleh Bank Sampah Induk Rumah Harum tersebut. Saat ini, Bank Sampah Induk Rumah

Harum berada di bawah tanggung jawab Bapak Hermansyah dan termasuk ke dalam bank sampah induk teraktif di Kota Depok.

Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok dikatakan menerapkan pemberdayaan masyarakat karena selain berupaya meminimalisasi volume sampah melalui pemilahan sampah, tetapi juga memberikan edukasi melalui pelatihan terutama kepada pengurus bank sampah unit yang bermitra (Ardhiansyah dan Budihartanti, 2022: 533). Pelatihan yang diberikan tersebut, antara lain diajarkan untuk membuat kerajinan atau keterampilan pengolahan plastik-plastik, seperti tas, bunga, tempat pensil, tikar, dan sebagainya yang memiliki nilai manfaat di bidang ekonomi dan sosial.

Bank Sampah Induk Rumah Harum memiliki program-program yang diharapkan menambah pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta diharapkan masyarakat mampu menggali kemampuan yang dimiliki dan mengembangkan kemampuan hingga masyarakat menjadi mandiri. Berkaitan dengan hal tersebut, pemilahan dan penimbangan sampah merupakan beberapa kegiatan yang terdapat di Bank Sampah Induk Rumah Harum yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sampah-sampah yang didominasi oleh sampah anorganik, seperti kertas, plastik, kemasan sisa makanan, logam, dan sebagainya yang masih mempunyai nilai jual dapat dikumpulkan dan dipilah di Bank Sampah Induk Rumah Harum. Adapun jumlah sampah plastik yang terdapat di Bank Sampah Induk Rumah Harum saat ini mencapai 60% (enam puluh persen). Bank Sampah Induk Rumah Harum juga mengumpulkan sampah minyak

jelantah atau minyak sisa penggorengan untuk diolah kembali dan dijual kepada pengusaha biodiesel (Bank Sampah Induk Rumah Harum, 2023).

**Gambar 1.2**  
**Kegiatan Pemilahan Sampah di Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok**



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Keberjalanan program Bank Sampah Induk Rumah Harum telah membawa banyak perubahan yang terjadi dalam hal penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Program tersebut secara tidak langsung memberikan dampak yang baik, seperti masyarakat dapat memilah sampah untuk dijadikan sesuatu yang bernilai jual (Nasution, 2022: 6-7).

Program-program yang terdapat di Bank Sampah Induk Rumah Harum selain menjadikan masyarakat berdaya juga bertujuan untuk menjadi strategi pembangunan masyarakat dengan memberikan peranan yang dominan kepada masyarakat dalam mengelola proses pembangunan, terutama dalam mengawasi dan

mengelola sumber daya lokal melalui perubahan pandangan atau persepsi mengenai sampah. Program-program tersebut berupaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara kolektif agar dapat mencapai kesejahteraan sehingga secara perlahan diharapkan permasalahan sampah dapat teratasi (Nasution, 2022: 7). Dalam hal ini, program yang telah ada mendapatkan respons positif dari masyarakat sekitar yang terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh Bank Sampah Induk Rumah Harum. Adapun jumlah nasabah yang berpartisipasi dalam memilah dan melakukan donasi sampah untuk dikelola menjadi sampah yang bernilai jual, yakni mencapai 634 orang.

Bank Sampah Induk Rumah Harum di samping memiliki program-program yang dapat memberikan dampak positif juga telah memperoleh beberapa penghargaan, antara lain pemenang terbaik ketiga pada perlombaan Business Pitching untuk Pelatihan dan Pendampingan Model Bisnis bagi Bank Sampah dan TPS3R dalam Mewujudkan Kemandirian Melalui Penerapan Konsep Circular Economy yang dilaksanakan oleh Yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia pada tahun 2022, penghargaan Anugerah Raksa Prasada Tahun 2023 untuk kategori Bank Sampah Induk Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan sebagainya. Adanya beberapa program unggulan dan penghargaan yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa Bank Sampah Induk Rumah Harum dapat menjadi percontohan bagi bank sampah lainnya di Kota Depok.

Pada dasarnya, untuk melakukan suatu perubahan akan dapat terwujud apabila terdapat sikap, keinginan, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat

diandalkan dari individu atau kelompok. Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Soemarwoto (2005) bahwa adanya dampak dari aktivitas tertentu menjadikan suatu perubahan dapat terjadi. Dalam hal ini, salah satu aspek yang perlu diperhatikan, yaitu persepsi masyarakat karena apabila persepsi atau pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah kurang baik maka dapat menyebabkan kurang optimalnya keberjalanan bank sampah dan mengakibatkan kurangnya keikutsertaan masyarakat di dalam pengelolaan sampah. Sejalan dengan hal tersebut, kurangnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dapat berpengaruh pada keberadaan Bank Sampah Induk Rumah Harum.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan agar perubahan pada masyarakat dapat terwujud. Pemberdayaan merupakan proses perubahan yang melibatkan inovasi dalam bentuk konsep, ide, produk, metode, dan teknologi (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 66). Tujuan utama pemberdayaan pada dasarnya, yaitu menguatkan kekuasaan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat kurang berdaya yang diakibatkan oleh kondisi dari dalam atau internal berupa persepsi dan kondisi dari luar atau eksternal.

Dalam mengetahui dan mendalami proses pemberdayaan masyarakat, Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6) mengemukakan bahwa pemberdayaan terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam Bank Sampah Induk Rumah Harum didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bermacam-macam. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dalam hal ini memberikan bantuan, seperti mengambil residu sampah yang

terdapat di Bank Sampah Induk Rumah Harum untuk diberikan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Yayasan WWF Indonesia memberikan bantuan berupa penyediaan alat pengolah dan pencacah sampah. PT Nutrifood Indonesia, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk turut mendukung keberjalanan Bank Sampah Induk Rumah Harum dengan memberikan sumbangan limbah atau sampah-sampah, terutama sampah plastik untuk diolah kembali menjadi sesuatu yang mempunyai nilai guna.

**Gambar 1.3**  
**Kegiatan Pemanfaatan Sampah Plastik dari Pengurus Bank Sampah Unit binaan Bank Sampah Induk Rumah Harum**



(Sumber: Bank Sampah Induk Rumah Harum, 2023)

Eksistensi Bank Sampah Induk Rumah Harum yang mendapatkan tanggapan positif serta perolehan penghargaan dari berbagai perlombaan yang diikuti, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan. Haque (2021: 5-6) menyatakan bahwa saat ini belum terdapat Nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum yang memanfaatkan sampah, seperti minyak jelantah dan sebagainya untuk dijadikan sesuatu yang memiliki manfaat kembali. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan prasarvei penelitian, peneliti menemukan adanya beberapa



permasalahan atau hambatan lain terkait dengan pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat. Adapun permasalahan atau hambatan tersebut, antara lain:

**Pertama**, tahap pendayaan belum mampu menjadikan masyarakat berdaya dari segi finansial atau ekonomi. Tahap pendayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 6) merupakan kegiatan untuk memberikan daya, kekuasaan, dan peluang kepada masyarakat sebagai target sesuai dengan kecakapan yang dimiliki. Namun berdasarkan observasi prapenelitian, peneliti tidak menemukan adanya masyarakat yang secara mandiri dapat menjadikan Bank Sampah Induk Rumah Harum sebagai peluang usaha, baik untuk membuat suatu produk daur ulang dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan hasil prasurvei wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum berikut:

“Sejauh ini belum ada nasabah yang secara pribadi membuka usaha, seperti jualan produk daur ulang sampah itu belum ada. Mereka kebanyakan ikut kegiatan pemberian sampah atau terkadang ikut pelatihannya saja. Untuk peluang usaha kebanyakan pengurus bank sampah unit yang meneruskan” (Prasurvei Wawancara tanggal 28 April 2023).

Berdasarkan wawancara prasurvei tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat dalam hal ini nasabah bank sampah belum memanfaatkan peluang usaha, seperti menjual produk daur ulang sampah. Sebagian besar masyarakat atau nasabah bank sampah hanya mengikuti kegiatan penyetoran sampah dan pelatihan yang diberikan bank sampah sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memperoleh pendayaan dari segi ekonomi.

**Kedua**, masih kurangnya keterlibatan nasabah bank sampah dalam memberikan sampah yang dimiliki ke Bank Sampah Induk Rumah Harum secara rutin. Sebagian besar nasabah bank sampah mengumpulkan sampah anorganik di rumah masing-masing agar banyak terlebih dahulu dan belum tentu dalam seminggu sekali nasabah bank sampah memberikan sampahnya sehingga dapat mengakibatkan pergerakan bank sampah menjadi sedikit terhambat. Hal tersebut sesuai dengan wawancara prasurvei yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum berikut:

“Hambatan dalam pengelolaan sampah itu bisa terjadi karena ada beberapa nasabah kami yang memberikan sampahnya jarang-jarang sehingga kalau belum ada sampah dari nasabah kami biasanya mengandalkan limbah dari perusahaan” (Prasurvei Wawancara tanggal 28 April 2023).

Berdasarkan wawancara prasurvei yang dilakukan oleh peneliti tersebut, menunjukkan bahwa minimnya keterlibatan nasabah bank sampah yang tidak memberikan sampah secara rutin dapat memengaruhi keberjalanan Bank Sampah Induk Rumah Harum. Nasution (2022: 6) menyatakan bahwa adanya program di Bank Sampah Induk Rumah Harum tidak secara langsung menjadikan masyarakat atau nasabah bank sampah dapat memilah sampah dan mengumpulkan sampah secara rutin.

**Ketiga**, sarana dan prasarana yang ada saat ini belum dapat menunjang kegiatan Bank Sampah Induk Rumah Harum sehingga menyebabkan adanya keterbatasan bank sampah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara prasurvei yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum sebagai berikut:

“Permasalahan lainnya ada juga terkait fasilitas di Bank Sampah Induk Rumah Harum ini yang belum sepenuhnya memadai, seperti mobil pengangkut sampah kami hanya punya dua, lahan yang masih kurang untuk sampah yang bertambah setiap harinya, biaya operasional juga” (Prasurvei Wawancara tanggal 28 April 2023).

Wawancara prasurvei tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia meskipun telah dibantu oleh Pemerintah Kota Depok dan beberapa *Corporate Social Responsibility* atau CSR dinilai belum sepenuhnya menunjang kebutuhan bank sampah. Hal tersebut karena masih terdapat kekurangan fasilitas dalam hal moda transportasi untuk pengangkutan sampah, lahan yang terbatas, dan pendanaan yang belum mencukupi operasionalisasi bank sampah.

Berdasarkan penjabaran dari berbagai permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok belum berjalan dengan optimal sehingga diperlukan adanya penelitian secara mendalam untuk mengkaji atau menganalisis mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul pada penelitian ini, yaitu **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Induk ‘Rumah Harum’ di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan topik pembahasan, antara lain:

1. Tahap pendayaan belum mampu menjadikan masyarakat berdaya dari segi finansial atau ekonomi.
2. Masih kurangnya keterlibatan nasabah bank sampah dalam memberikan sampah yang dimiliki ke Bank Sampah Induk Rumah Harum secara rutin.
3. Sarana dan prasarana yang ada saat ini belum dapat menunjang kegiatan Bank Sampah Induk Rumah Harum.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah di antaranya:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk ‘Rumah Harum’ di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk ‘Rumah Harum’ di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk ‘Rumah Harum’ di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk 'Rumah Harum' di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada tataran teoretis dan tataran praktis sebagai berikut:

#### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi setiap pembacanya, terutama pada rumpun Administrasi Publik mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. Selain itu, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang akan menganalisis topik serupa dengan yang diteliti oleh peneliti serta analisisnya untuk kepentingan di masa mendatang.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat dalam memberikan pemahaman terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum kepada masyarakat secara luas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Depok dan pihak birokrat terkait agar dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dari Bank Sampah Induk Rumah Harum. Hasil penelitian ini juga diharapkan berdampak pada meningkatnya semangat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh Bank Sampah Induk Rumah Harum. Pemberdayaan masyarakat yang baik melalui pengelolaan bank sampah diharapkan dapat

menjadikan masyarakat lebih berdaya, baik dari segi ekonomi, sosial maupun pendidikan sehingga memberikan manfaat dan perubahan yang signifikan bagi lingkungan agar semakin bersih, kondisi ekonomi yang semakin membaik, serta kekeluargaan yang semakin harmonis antar warga di Kelurahan Abadijaya.

Adapun bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih dalam dan menjadi penyedia informasi baru mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum, serta meningkatkan keterampilan dalam melakukan riset. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan, terutama bagi mahasiswa Administrasi Publik mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah.

## 1.6 Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini, terdapat beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Kerangka teori merupakan kajian dari beberapa teori yang diperoleh melalui kajian pustaka yang digunakan untuk mendukung penelitian berkaitan dengan kajian peneliti serta mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.5**  
**Penelitian Terdahulu**

(1) No	(2) Nama Peneliti	(3) Judul Penelitian	(4) Metode Penelitian	(5) Aspek yang Diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
1.	Wegi Trio Putra dan Ismaniar (2020)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah	Deskriptif Kualitatif	Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dengan menggunakan 5 (lima) tahapan proses pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2013), yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Panca Daya di Kecamatan Kuranji Kota Padang merupakan salah satu lembaga pemberdaya masyarakat yang mampu meningkatkan jumlah nasabah bank sampah secara signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena Bank Sampah Panca Daya menerapkan 5 (lima) tahapan proses pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2013) dengan hasil temuan penelitian, antara lain melakukan penyadaran, memberikan edukasi, memberikan rasa aman,

(1) No	(2) Nama Peneliti	(3) Judul Penelitian	(4) Metode Penelitian	(5) Aspek yang Diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
					<p>memberikan bimbingan, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah dan komunikasi yang baik.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada aspek yang digunakan dan lokus yang dipilih. Penelitian terdahulu menggunakan aspek dengan melihat tahapan proses pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2013) yang meliputi Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan aspek dengan melihat 3 (tiga) tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6) yang terdiri dari Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayaan.</p>
2.	Nisa Tullatifah (2020)	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Srayan Makarya, Bobosan, Purwokerto Utara, Banyumas)	Deskriptif Kualitatif	<p>Aspek yang diteliti dalam penelitian terdahulu ini berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun faktor pendukung, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan anggota atau nasabah bank sampah</li> <li>2. Sarana dan prasarana</li> <li>3. Keterlibatan masyarakat sekitar</li> </ol>	<p>Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat telah terlaksana dengan baik, tetapi masih diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat agar dalam kegiatan bank sampah masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Selain itu, masih diperlukan adanya pelatihan bagi pengurus agar dapat memengaruhi dan menarik masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah.</p> <p>Pada penelitian terdahulu ini, menjadi pedoman peneliti dalam menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pengelolaan bank sampah. Faktor pendukung dan</p>



(1) No	(2) Nama Peneliti	(3) Judul Penelitian	(4) Metode Penelitian	(5) Aspek yang Diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
				<p>4. Kerja sama dengan pihak lain.</p> <p>Faktor penghambat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaksiplinan nasabah bank sampah</li> <li>2. Pola pikir atau <i>mindset</i> yang kurang tepat.</li> </ol> <p>Kemudian, tahapan pemberdayaan masyarakat dalam penelitian terdahulu ini menggunakan teori Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang meliputi tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.</p>	<p>faktor penghambat tersebut mencakup kapabilitas yang sama dengan Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok karena memiliki permasalahan yang sama. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu terletak pada lokus penelitian. Penelitian terdahulu memiliki lokus penelitian di Bank Sampah Srayan Makarya, sedangkan penelitian ini memiliki lokus di Bank Sampah Induk Rumah Harum.</p>
3.	Muhammad Bagus Setiadi dan Galih Wahyu Pradana (2022)	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	Kualitatif	Proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata Genilangit dilakukan dengan melihat teori pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiani (2014) yang meliputi pendekatan <i>Context</i> ,	Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata Genilangit dengan menggunakan pendekatan <i>Context, Input, Process, Output, dan Outcome</i> (CIPOO) menurut Sulistiani (2014) telah berdampak pada sosial masyarakat, seperti adanya interaksi yang sangat terbuka, permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat

(1) No	(2) Nama Peneliti	(3) Judul Penelitian	(4) Metode Penelitian	(5) Aspek yang Diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
				<i>Input, Process, Output, dan Outcome (CIPOO).</i>	<p>menjadi dapat terkendali, serta adanya keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat.</p> <p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokus penelitian, yakni penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 2022 berada di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, sedangkan pada penelitian ini lokusnya berada di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Selain itu, aspek dan teori terkait dengan tahapan pemberdayaan yang digunakan memiliki perbedaan. Penelitian terdahulu ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiani (2014) yang terdiri dari <i>Context, Input, Process, Output, dan Outcome (CIPOO)</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6) yang meliputi <i>Penyadaran, Pengkapasitasan, serta Pendayaan</i>.</p>
4.	Ahmad Rivai (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Cangkir Hijau Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro	Deskriptif Kualitatif	Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Bank Sampah Cangkir Hijau Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Deliveri yang dikutip oleh Mardikanto	Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemberian kesadaran kepada masyarakat. Dalam melakukan pemberdayaan ini, didapatkan hasil berupa adanya perubahan dari segi lingkungan yang menjadi lebih bersih dan tertata, serta dapat menaikkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan masyarakat memperoleh keuntungan dari sampah yang dikumpulkan.

(1) No	(2) Nama Peneliti	(3) Judul Penelitian	(4) Metode Penelitian	(5) Aspek yang Diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
				<p>dan Soebianto (2013). Tahapan pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleksi lokasi atau wilayah</li> <li>2. Sosialisasi</li> <li>3. Pelaksanaan</li> <li>4. Pemandirian masyarakat.</li> </ol>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Rivai, yaitu selain berbeda dalam lokus juga berbeda dalam aspek yang digunakan untuk menilai tahapan pemberdayaan yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu ini, menggunakan 4 (empat) aspek tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Deliveri yang dikutip Mardikanto dan Soebianto (2013) yang meliputi Wilayah, Sosialisasi, Pelaksanaan, dan Pemandirian. Sementara itu, dalam penelitian peneliti ini menggunakan 3 (tiga) aspek yang terdiri dari Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6) mengenai teori tahapan pemberdayaan masyarakat.</p>
5.	Tiara Khairina Bella, Nina Widowati, dan Maesaroh (2022)	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah 'Gedawang Asri' Kelurahan Gedawang Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Deskriptif Kualitatif	<p>Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyadaran</li> <li>2. Pengkapasitasan</li> <li>3. Pendayaan.</li> </ol>	<p>Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang Asri masih mengalami adanya permasalahan dalam setiap tahapan pemberdayaan. Dalam tahapan penyadaran, dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Bank Sampah Gedawang Asri, kurangnya peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta belum adanya sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>. Dalam tahapan pengkapasitasan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat pengelola yang tidak mengikuti koordinasi. Pada tahapan pendayaan,</p>

(1) No	(2) Nama Peneliti	(3) Judul Penelitian	(4) Metode Penelitian	(5) Aspek yang Diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
					<p>belum dapat memberikan daya secara maksimal karena adanya pengaruh finansial yang dinilai belum cukup memberdayakan masyarakat Kelurahan Gedawang dari segi ekonomi.</p> <p>Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tiara Khairina Bella, dkk dengan penelitian ini, yaitu terletak pada lokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Induk Rumah Harum, Kota Depok, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Bank Sampah Gedawang Asri, Kota Semarang.</p>
6.	Muhammad Supriansyah, Muhammad Riduansyah Syafari, dan Muhammad Anshar Nur (2022)	<i>Community Empowerment Through Waste Bank Program in Mandar Sari, Banjar Regency</i>	Deskriptif Kualitatif	Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Purna Praja Daur di Desa Mandar Sari dilakukan melalui beberapa tahapan menurut teori pemberdayaan masyarakat oleh Mardikanto dan Soebianto (2013), antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyadaran</li> <li>2. Penguatan kapasitas.</li> </ol>	<p>Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program bank sampah di Desa Mandar Sari terdiri dari tahap penyadaran dan tahap penguatan kapasitas individu. Pada aspek penyadaran, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi. Pada aspek penguatan kapasitas individu, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan individu, kelembagaan, serta jaringan atau <i>system networking</i>.</p> <p>Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Supriansyah, dkk dengan penelitian ini, yaitu terletak pada lokus penelitian dan tahapan pemberdayaan masyarakat yang digunakan. Pada penelitian terdahulu, lokus penelitian berada di Bank Sampah Desa Mandar Sari,</p>

(1) No	(2) Nama Peneliti	(3) Judul Penelitian	(4) Metode Penelitian	(5) Aspek yang Diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
					sedangkan lokus dalam penelitian ini berada di Bank Sampah Induk Rumah Harum. Kemudian, penelitian terdahulu ini hanya menggunakan 2 (dua) tahapan pemberdayaan masyarakat menurut teori Mardikanto dan Soebianto (2013) yang terdiri dari Penyadaran dan Penguatan Kapasitas, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahapan pemberdayaan masyarakat berdasarkan teori Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6) yang terdiri dari Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayaan.
7.	Muhammad Chairul Basrun Umanailo, Muhammad Mukaddar, Syaiful Rachman, Riki Bugis, dan Abdul Talib Bon (2019)	<i>Empowerment Community in Buru Regency</i>	Deskriptif Kualitatif	Proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buru dilihat berdasarkan aspek program pemberdayaan yang dijalankan. Kemudian, proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buru menerapkan teori Loh dan Agyeman yang menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator pemberdayaan masyarakat yang meliputi Perencanaan, Tujuan, Pendekatan Proses atau Program, Kesesuaian Program dengan Kebutuhan,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam periode 2005-2014 pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buru belum dapat dikatakan efektif karena nilai substansi yang diharapkan belum tercapai dengan baik. Hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai program-program pemberdayaan yang dicanangkan. Banyak program yang tumpang tindih antara program pusat dan regional, serta ketergantungan program pemberdayaan pada anggaran.  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu terletak pada lokus penelitian. Pada penelitian terdahulu, lokus penelitian berada di Kabupaten Buru, sedangkan lokus dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berada di Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok. Selain itu, penelitian terdahulu

(1) No	(2) Nama Peneliti	(3) Judul Penelitian	(4) Metode Penelitian	(5) Aspek yang Diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
				Peran Fasilitator, serta Partisipasi Masyarakat.	lebih menjelaskan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, serta teori pemberdayaan masyarakat yang digunakan memiliki perbedaan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Loh dan Agyeman, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6).
8.	Nurdewi, Ghozali Maskie, Multifiah, dan Asfi Manzilati (2020)	<i>Empowerment of Spice Farmers Community in Maluku Utara for Sustainable Agricultural Development</i>	Kualitatif Deskriptif	<p>Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menerapkan teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2013: 16) yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencerahan</li> <li>2. Pembangunan</li> <li>3. Penegakan Hukum.</li> </ol> <p>Selain itu, aspek yang diteliti berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, keterampilan, dan kekuatan masyarakat.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan kepada petani untuk keberlanjutan dan pembangunan belum maksimal sehingga diperlukan beberapa alternatif agar pemberdayaan tersebut dapat <i>sustainable</i> apabila CSR tidak memberikan dukungan kepada komunitas tani rempah tersebut.</p> <p>Perbedaan penelitian terletak pada tahapan yang digunakan dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang peneliti teliti sama-sama memiliki <i>Corporate Social Responsibility</i> atau CSR yang memberikan dukungan kepada Bank Sampah Induk Rumah Harum. Selain itu, penelitian terdahulu ini menggunakan subjek komoditas tertentu, yaitu petani rempah, sedangkan subjek peneliti, yaitu nasabah bank sampah dengan memiliki pekerjaan yang beragam. Perbedaan selanjutnya, yaitu aspek yang digunakan untuk melihat tahapan</p>

(1) No	(2) Nama Peneliti	(3) Judul Penelitian	(4) Metode Penelitian	(5) Aspek yang Diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
					<p>pemberdayaan masyarakat dan lokus yang digunakan. Penelitian terdahulu ini menerapkan teori pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2013: 16) untuk aspek yang diteliti, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6). Lokus penelitian terdahulu berada di Maluku Utara, sedangkan penelitian ini berada di Bank Sampah Induk Rumah Harum Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.</p>
9.	Fitri Febrina Anggraini dan Titik Djumiarti (2020)	<i>The Process of Community Empowerment in Integrated Waste Management in the Pedurungan Kidul Village Semarang City</i>	Kualitatif Deskriptif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang. Tahapan pemberdayaan yang diterapkan dilihat dari teori pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 2-5), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyadaran</li> <li>2. Pengkapasitasan</li> </ol>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan pemberdayaan. Akan tetapi, tiga tahapan tersebut dikatakan belum berjalan dengan baik karena masih terdapat permasalahan terkait masyarakat yang belum sadar untuk hidup bersih dan sehat.</p> <p>Perbedaan penelitian terdahulu ini terletak pada lokus yang diteliti, yaitu berada di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang, sedangkan lokus penelitian peneliti berada di Bank Sampah Induk Rumah Harum Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.</p>

(1) No	(2) Nama Peneliti	(3) Judul Penelitian	(4) Metode Penelitian	(5) Aspek yang Diteliti	(6) Hasil dan Perbedaan
				3. Pendayaan.	
10.	Mujahiddin (2019)	<i>The Process of Society Empowerment in Managing Waste for Sustainable Development (Study on Waste Bank in Sicanang District Belawan)</i>	Kualitatif Deskriptif	Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan melihat teori pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam Triyono (2014), yaitu meliputi: 1. Peningkatan Partisipasi 2. Sosialisasi Pemilahan Sampah 3. Pelatihan Daur Ulang Sampah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif pada perubahan lingkungan, sosial, serta ekonomi. Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.  Penelitian ini digunakan sebagai penguat data yang dijabarkan dalam penelitian peneliti dengan mengacu pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada lokus, yaitu Bank Sampah di Kecamatan Sicanang, sedangkan lokus penelitian peneliti berada di Bank Sampah Induk Rumah Harum, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Selain itu, perbedaan dapat terlihat pada aspek yang diteliti, yakni penelitian terdahulu ini melihat proses pemberdayaan masyarakat berdasarkan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam Triyono (2014), sedangkan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6).

(Sumber: Data Diolah dari Beberapa Kebaruan Penelitian yang Berbeda-Beda, 2023)



Peneliti menyajikan 10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Penelitian pertama yang ditulis oleh Wegi Trio Putra dan Ismaniar (2020) memiliki perbedaan penelitian yang terletak pada lokus penelitian, yakni pada penelitian terdahulu ini memiliki lokus di Bank Sampah Panca Daya Kecamatan Kuranji Kota Padang, sedangkan penelitian ini memiliki lokus di Bank Sampah Induk Rumah Harum. Selain itu, penelitian terdahulu ini melihat tahapan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2013), sedangkan penelitian ini melihat tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6). Penelitian kedua yang ditulis oleh Nisa Tullatifah (2020) memiliki perbedaan lokus penelitian, yakni penelitian terdahulu ini terletak di Bank Sampah Srayan Makarya Banyumas, sedangkan penelitian ini di Bank Sampah Induk Rumah Harum. Selain itu, informan yang digunakan memiliki perbedaan, yaitu penelitian ini mewawancarai pihak bank sampah unit yang bermitra, sedangkan penelitian terdahulu ini tidak mewawancarai pihak luar dari bank sampah yang diteliti. Persamaan kedua penelitian ini, yaitu terletak pada faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat karena penelitian terdahulu ini menjadi pedoman peneliti dalam melihat faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ketiga ditulis oleh Muhammad Bagus Setiadi dan Galih Wahyu Pradana tahun 2022. Pada penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang terletak pada lokus penelitian, yakni penelitian terdahulu memiliki lokus di Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian ini di Kota Depok. Selain itu, aspek dan teori yang digunakan memiliki perbedaan,

yakni penelitian terdahulu ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan menurut Sulistiani (2014), sedangkan penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007). Penelitian keempat ditulis oleh Ahmad Rivai tahun 2019 memiliki perbedaan yang terletak pada lokus penelitian, yakni penelitian terdahulu ini memiliki lokus di Bank Sampah Cangkir Hijau, sedangkan penelitian ini memiliki lokus di Bank Sampah Induk Rumah Harum. Selain itu, aspek yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan karena menggunakan tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2013).

Penelitian kelima yang ditulis oleh Bella., Widowati., dan Maesaroh (2022) memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu ini memiliki lokus di Bank Sampah Gedawang Asri Kota Semarang, sedangkan penelitian ini memiliki lokus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) terdiri dari 3 (tiga) tahapan pemberdayaan yang meliputi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penelitian keenam yang ditulis oleh Muhammad Supriansyah dkk. tahun 2022 memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu memiliki lokus di Bank Sampah Desa Mandar Sari, sedangkan penelitian ini memiliki lokus di Bank Sampah Induk Rumah Harum. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2013) yang hanya terdiri dari dua tahapan, sedangkan

penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang terdiri dari tiga tahapan.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Muhammad Chairul dkk. tahun 2019 memiliki perbedaan penelitian, yakni penelitian terdahulu memiliki lokus penelitian di Kabupaten Buru, sedangkan penelitian ini memiliki lokus penelitian di Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok. Selain itu, penelitian terdahulu ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Loh dan Agyeman dan hanya menjelaskan mengenai program pemberdayaan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007).

Penelitian kedelapan ditulis oleh Nurdewi dkk. tahun 2020 memiliki perbedaan penelitian, yakni penelitian terdahulu memiliki lokus penelitian di Maluku Utara, sedangkan penelitian ini memiliki lokus di Kota Depok. Selain itu, penelitian ini menggunakan tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2013: 16) dengan melihat aspek pencerahan, pembangunan, dan penegakan hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6) dengan melihat aspek penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penelitian kesembilan yang ditulis oleh Fitri Febrina Anggraini dan Titik Djumiarti tahun 2020 memiliki perbedaan penelitian, yakni penelitian terdahulu ini memiliki lokus di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang, sedangkan penelitian ini memiliki lokus di Bank Sampah Induk Rumah Harum Kota Depok.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Mujahiddin tahun 2019 memiliki perbedaan penelitian, yakni lokus penelitian terdahulu ini terletak di Bank Sampah Kecamatan Sicanang, sedangkan lokus penelitian ini terletak di Bank Sampah Induk Rumah Harum Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Selain itu, perbedaan terdapat pada aspek yang diteliti, yaitu penelitian terdahulu ini melihat proses pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam Triyono (2014), sedangkan penelitian ini melihat tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007).

Kesepuluh penelitian yang diuraikan tersebut sebagian besar membahas mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada masing-masing lokus penelitian. Semua penelitian terdahulu tersebut dijadikan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Terdapat kebaruan atau *novelty* antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Kebaruan tersebut dilihat dari teori yang digunakan peneliti, yaitu teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6), serta mengadopsi faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat menurut Tullatifah (2020: 72). Selain itu, dapat dilihat pada lokus yang digunakan peneliti, yakni penelitian ini berada di Bank Sampah Induk Rumah Harum Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

### 1.6.2 Administrasi Publik

Istilah administrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata, yaitu *ad* dan *ministrare* yang berarti *to serve* serta dapat dimaknai sebagai kegiatan melayani atau memenuhi (dalam Anggara, 2016: 13). Dalam hal ini, administrasi dapat didefinisikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang atau jasa publik, serta sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Sementara itu, publik dapat dikatakan sebagai bagian dari beberapa orang yang sama dalam berpikir, menyalurkan pendapat atau aspirasi, harapan, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan norma.

Administrasi Publik terdiri dari dua suku kata, yaitu administrasi dan publik. Menurut Sondang Siagian (dalam Rahman, 2017: 8), administrasi merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang berdasarkan pemikiran tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendapat tersebut sejalan dengan definisi administrasi yang dikemukakan oleh Waldo (dalam Syafri, 2012: 10) bahwa administrasi merupakan bentuk usaha kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi publik secara umum, yaitu sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan tujuan. Publik menurut Inu Kencana Syafii (dalam Nurhartati,

2013: 4), yakni beberapa manusia yang memiliki kesamaan pikiran, harapan, sikap, dan tindakan yang baik berdasarkan norma serta nilai yang dimiliki.

John Pfiffner (dalam Rahman, 2017: 11) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai bentuk implementasi kebijakan dari pemerintah yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Pemerintahan dan didominasi oleh perwakilan politik. Selain itu, Pfiffner juga mendefinisikan Administrasi Publik sebagai sekelompok orang untuk menjalankan kebijakan pemerintahan, terutama dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2019: 3) juga turut mengungkapkan bahwa Administrasi Publik merupakan suatu proses berkaitan dengan sumber daya dan personel publik yang diorganisasi serta dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola atau *manage* keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Berbeda dengan pendapat dari Land dan Rosebloom (dalam Akib, 2009: 1) bahwa Administrasi Publik sebaiknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan bekerja secara efektif dan efisien, serta tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Hughes (dalam Akib, 2009: 1) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai kegiatan pelayanan dalam hal ini melayani publik sebagai bentuk melaksanakan kebijakan yang didapatkan berdasarkan prosedur bentuk implementasi kebijakan ke dalam suatu bentuk aktivitas atau tindakan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan mengenai Administrasi Publik, maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan suatu

bentuk kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dalam rangka melaksanakan pelayanan publik untuk mengatasi permasalahan publik melalui kebijakan yang akan diimplementasikan agar dapat melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Suatu disiplin ilmu dapat dilihat perkembangannya melalui perubahan paradigma. Administrasi Publik terus tumbuh mengikuti perkembangan zaman sehingga saat ini telah terdapat enam paradigma Administrasi Publik yang berfungsi untuk memberikan gambaran terkait dengan perubahan-perubahan dan perbedaan dalam tujuan, teori, dan metodologi atau dalam nilai-nilai yang menjadi dasar. Menurut Nicholas Henry (dalam Syafiie, 2006: 27), paradigma Administrasi Publik, antara lain:

#### **1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1927)**

Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam buku yang berjudul *Politics and Administration* memberikan pernyataan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi berbeda. Pertama, yaitu fungsi politik yang berfokus pada pembuatan kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat. Kedua, yaitu fungsi administrasi yang menitikberatkan pada pemberian perhatian dalam implementasi kebijakan.

Paradigma ini mempunyai implikasi bahwa administrasi dinilai sebagai sesuatu yang bebas nilai serta mengarah pada pencapaian nilai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan. Paradigma ini menitikberatkan pada

lokus, yakni birokrasi pemerintahan. Sementara itu, metode dan fokus yang ada kurang diperhatikan dan dibahas dalam paradigma ini.

## **2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)**

Fokus dalam paradigma ini, yaitu prinsip-prinsip administrasi. Prinsip tersebut dapat diterapkan dalam berbagai hal yang meliputi *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *coordinating*, *reporting*, dan *budgeting* atau dikenal dengan POSDCORB. Sementara itu, lokus dalam paradigma ini tidak jelas karena prinsip tersebut dapat diimplementasikan pada berbagai tempat. Tokoh yang mendukung paradigma ini, antara lain Willaughby, Gullick dan Urwick, serta Taylor dan Fayol.

## **3. Administrasi Publik/Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)**

Kemunculan paradigma ini disebabkan oleh banyaknya kritik yang mempermasalahkan pemisahan antara politik dan administrasi. Kritik lain, yaitu terkait dengan prinsip administrasi yang dinilai berubah-ubah sehingga tidak dapat diterapkan secara universal. Lokus Administrasi Publik dalam paradigma ini berada pada birokrasi pemerintahan. Sementara itu, fokus dalam paradigma ini tidak jelas karena prinsip Administrasi Publik memiliki banyak kekurangan. Tokoh yang mendukung paradigma ini, antara lain Herbert Simon, Morstein-Marx, dan John Gaus.

## **4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)**

Paradigma ini menitikberatkan bahwa Administrasi Publik berfokus pada ranah prinsip-prinsip manajemen yang telah ada kemudian dikembangkan kembali, seperti perilaku organisasi, analisis sistem, riset operasi, atau



manajemen yang telah maju. Lokus dalam paradigma ini tidak jelas karena fokusnya dapat diterapkan pada dunia bisnis maupun Administrasi Publik.

#### **5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)**

Paradigma ini merupakan paradigma terakhir yang sudah dilengkapi dengan fokus dan lokus yang jelas. Fokus dalam paradigma ini, yaitu teori organisasi, manajemen dan kebijakan publik. Sementara itu, lokus dalam paradigma ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Paradigma ini telah memberikan kejelasan fokus yang akan dipelajari oleh Administrasi Publik dan lokus atau tempat studi yang dapat diterapkan. Adanya kejelasan tersebut maka paradigma ini dinilai sebagai suatu rangkaian yang menghubungkan antara fokus Administrasi Publik dengan lokusnya sehingga terdapat keselarasan antara berbagai macam teori yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan publik yang menjadi lokus Administrasi Publik.

#### **6. *Good Governance* (1990-Sekarang)**

Di Indonesia, paradigma *good governance* muncul ketika era reformasi. Kemunculan paradigma *good governance* karena adanya tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era orde baru dengan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pemusatan kekuasaan pada Presiden, baik akibat konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945) maupun lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya yang tidak berfungsi dengan baik, serta terhambatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.

Berdasarkan penjelasan dari paradigma tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini pada paradigma 5 (lima), yaitu paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Hal tersebut karena di dalam paradigma ini telah dijelaskan terdapat fokus dan lokus yang jelas di dalam Administrasi Publik. Kejelasan fokus dan lokus Administrasi Publik dalam penelitian ini, yaitu fokusnya mengenai pemberdayaan masyarakat dan lokusnya berkaitan dengan masalah-masalah publik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang membahas mengenai permasalahan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk 'Rumah Harum' di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

#### **1.6.4 Manajemen Publik**

Manajemen merupakan suatu cara yang dapat memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk melakukan perencanaan pencapaian yang diinginkan. Dalam hal ini, tanpa adanya manajemen maka tujuan menjadi sulit untuk tercapai. Manajemen juga berguna untuk mengatur suatu manfaat, efisiensi, dan efektivitas (Abdurrahman, 2018: 8). Shafritz dan Russel (dalam Moenir, 2016: 26-27) menjelaskan bahwa manajemen merupakan hubungan antara manusia, proses, dan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi dengan pemanfaatan sumber daya, seperti sumber daya manusia dan sumber daya mesin untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Kata publik dalam Bahasa Yunani dikenal dengan istilah *kumon*, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *common* yang berarti hubungan antarindividu. Publik sering dikaitkan sebagai sebuah aktivitas yang mencakup berbagai kegiatan manusia yang dilihat perlu diatur oleh aturan sosial maupun

pemerintah atau disebut sebagai sektor publik atau sektor swasta (Nawawi, 2013: 3-4).

Overman (dalam Keban, 2019: 109) menyatakan bahwa manajemen publik merupakan suatu kajian dari organisasi serta merupakan penggabungan dari fungsi-fungsi manajemen, seperti *planning*, *organizing*, *controlling*, dan *actuating* yang di dalamnya mencakup sumber daya manusia, informasi, keuangan, politik, dan fisik. Ott, Hyde, dan Shafritz (dalam Keban, 2019: 109) menyatakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang yang terdapat di dalam Administrasi Publik yang saling bertumpang tindih satu sama lain. Dalam hal ini, kebijakan publik dinilai memiliki peranan dan diibaratkan sebagai sistem otak dan saraf, sedangkan manajemen publik diibaratkan sebagai sirkulasi pernapasan dan sistem jantung dalam tubuh makhluk hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen publik digunakan sebagai proses dalam menjalankan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sesuai perintah dari kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan kegiatan mengatur dan mengelola sumber daya yang ada, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi sumber daya yang telah direncanakan sebelumnya agar dalam keberjalanannya dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, serta ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat dan prinsip antara manajemen publik dan kebijakan publik dapat saling berkaitan satu sama lain.

Hubungan antara manajemen publik dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu memiliki hubungan kemampuan manajerial pengelola atau pengurus dalam upaya menggerakkan, mengelola, mengatur, dan memberi daya kepada masyarakat yang tergolong lemah agar mampu atau berdaya.

### **1.6.5 Pemberdayaan**

Pemberdayaan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *empowerment* yang berarti pemberkuasaan. Dalam hal ini, pemberkuasaan dapat dipahami sebagai memberikan kekuasaan kepada pihak bawah yang kurang beruntung atau lemah. Pemberdayaan merupakan suatu proses pemberian kekuasaan dan daya agar masyarakat dapat mampu secara mandiri (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 1) Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan, kekuatan, atau suatu proses menuju keadaan yang berdaya, keadaan memperoleh kekuatan, maupun proses pemberian kemampuan dari yang memiliki daya kepada pihak yang dinilai lemah (Keban dalam Aniq, 2019: 17).

Pemberdayaan selain sebagai pemberian daya juga sebagai proses seperti yang diungkapkan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013: 61), yaitu serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan meningkatkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami permasalahan kemiskinan. Soetomo (dalam Aniq, 2019: 18) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan ilmu pengetahuan yang termasuk ke dalam pendidikan informal serta bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kreativitas seseorang atau masyarakat agar dapat bergerak ke arah yang lebih baik.

Pemberdayaan menurut Hamid (2018: 9) adalah pemberian daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah atau dengan kata lain belum memiliki daya untuk hidup secara mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Selain itu, Suharto (dalam Hamid, 2018: 9) mengemukakan bahwa pemberdayaan merujuk pada kapasitas orang, terutama kelompok rentan dan lemah agar mereka mampu mengorganisasikan diri mereka menjadi lebih mandiri dan memiliki kekuatan. Menurut Putra dan Ismaniar (2020: 71), pemberdayaan diberikan kepada masyarakat yang tidak berdaya dan masyarakat yang sudah memiliki daya dengan syarat dapat dikatakan berhasil apabila mereka sudah memiliki keberdayaan serta partisipasi yang baik dalam program pemberdayaan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan usaha untuk memberikan kemampuan atau daya kepada masyarakat kelompok lemah untuk meningkatkan kehidupannya agar dapat mandiri dan dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menyejahterakan kehidupan mereka sendiri.

#### **1.6.6 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan dengan keputusan secara mandiri. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sumartiningsih (2004: 50) bahwa adanya pemberdayaan ditujukan untuk menciptakan kekuatan dan kemampuan masyarakat agar dapat memahami kebutuhannya sendiri serta dapat mengatasi permasalahan yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu,

Sulistiyani (2004: 77) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang dipahami sebagai penggabungan dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara kronologis dan sistematis yang menggambarkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang mampu atau lemah menjadi mampu dan berdaya kembali.

Berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Gunawan (dalam Hamid, 2018: 10) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk aksi sosial dari sebuah komunitas atau masyarakat untuk mengorganisasikan diri mereka ke dalam perencanaan atau tindakan agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada atau untuk memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, Irmawita (dalam Putra dan Ismaniar, 2020: 70) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses pemberian dukungan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke dalam sumber daya pembangunan untuk menjalani dan mengembangkan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai suatu program dan proses. Program yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, yaitu pemberdayaan dilihat dari tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sementara, pemberdayaan sebagai proses berarti bahwa pemberdayaan dapat dilihat berdasarkan bagaimana suatu organisasi atau komunitas mampu melakukan perubahan atau perbaikan yang tidak terbatas oleh waktu dan tidak hanya tertuju pada satu program kerja.

Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013: 61) bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses

berarti serangkaian kegiatan untuk memperoleh kesempatan dan/atau mengakses sumber daya, serta layanan yang dibutuhkan guna memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam hal ini, masyarakat dapat menjadi aktor utama dan penentu pembangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang semula kurang berdaya menjadi berdaya melalui upaya peningkatan kapasitas, kemandirian, kekuatan, kapabilitas, atau pengetahuan untuk mencapainya.

### **1.6.7 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat umumnya merujuk pada proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai tujuan berarti bahwa keadaan yang ingin diubah melalui perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud berarti berubah menjadi masyarakat yang berdaya dengan memiliki kemampuan, pengetahuan, serta kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut dapat berupa pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, atau sosial, seperti kemampuan menyampaikan pendapat, ikut serta dalam menjalankan tugas-tugas, serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial yang ada. Widiyawati (dalam Setiadi dan Pradana, 2022: 882) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan sering kali dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai suatu proses dan menjadi penentu dalam meningkatkan taraf hidup sehingga ketercapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui proses pemberdayaan tersebut.

Inti dari tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberdayaan termasuk ke dalam strategi pembangunan berbasis masyarakat yang merujuk pada upaya perbaikan kualitas hidup manusia, baik secara fisik maupun mental. Putra dan

Ismaniar (2020: 3) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui serangkaian kegiatan sebagai upaya dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, serta memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam menghadapinya.

Sulistiyani (2004: 80) mengemukakan tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk membentuk masyarakat agar memiliki kapabilitas dan mandiri dalam berbagai hal. Kemandirian masyarakat dapat dilihat melalui kemampuan berpikir, menentukan dan melaksanakan sesuatu yang dinilai tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan kemampuan yang dimiliki. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan orang yang lemah atau kurang beruntung menuju keadaan berdaya yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kekuasaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan ekonomi, fisik, atau sosial, serta dapat memberikan keuntungan, memiliki pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Pemberdayaan masyarakat juga dapat berupa bentuk usaha dalam mengubah persepsi atau cara pandang individu terhadap sesuatu agar menjadi lebih baik dan sadar.

Berdasarkan pendapat mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat dalam menghadapi ketidakberdayaan dan ketidakmampuan, serta menciptakan kepedulian untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama menuju arah yang lebih baik.



### **1.6.8 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan dikatakan sebagai suatu proses sehingga proses tersebut menjadi aspek penting dalam menilai pemberdayaan yang dilakukan. Proses dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai tahapan. Dalam pemberdayaan, terdapat berbagai macam tahapan yang dilakukan. Tahapan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan respons dari masyarakat. Tahapan dilakukan sebagai upaya pengembangan masyarakat yang diharapkan berakhir pada terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat.

Tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Nana Mintarti (dalam Habibah, 2009: 18-19), antara lain:

1. **Penyadaran**

Tahapan penyadaran dilakukan melalui pengetahuan terkait lingkungan dan potensi diri, serta membantu organisasi atau komunitas untuk melihat keadaan diri sendiri dengan kekuatan domestik maupun global berupa teknologi, informasi, budaya, politik, hingga modal sosial.

2. **Pengorganisasian**

Tahapan pengorganisasian harus dilakukan dengan upaya masyarakat secara sukarela serta terdapat suatu program penguatan organisasi yang diadakan.

3. **Kaderisasi**

Tahapan kaderisasi merupakan tahapan yang mengharuskan organisasi untuk menyiapkan kader-kader pengembangan keswadayaan lokal yang akan melaksanakan tugas pendampingan setelah program berakhir. Dalam hal ini, kader dipilih secara partisipatif oleh masyarakat.

#### 4. Dukungan Teknis

Tahapan dukungan teknis merupakan proses untuk membantu dalam memperbaiki teknologi serta proses dari pemberdayaan yang dilakukan.

#### 5. Pengelolaan Sistem

Tahapan pengelolaan sistem merupakan tahapan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, baik untuk individu maupun kelompok.

Wilson (dalam Sumaryadi, 2005: 130) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) tahapan pemberdayaan masyarakat yang meliputi *Awakening*, *Understanding*, *Harnessing*, dan *Using*.

1. *Awakening*, yaitu tahapan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat, baik dari segi keterampilan, sikap, serta kemampuan yang dimiliki dan rencana atau harapan untuk keadaan yang lebih baik.
2. *Understanding*, yaitu tahapan yang dilakukan dengan memberikan pemahaman terkait diri mereka dan membantu mengubah persepsi mereka, serta kondisi yang bersifat umum lainnya.
3. *Harnessing*, yaitu tahapan yang dilakukan setelah masyarakat mengerti dan sadar, serta menerima dengan baik terkait dengan pemberdayaan sehingga mereka perlu menentukan kemanfaatan untuk keberjalanan kelompoknya.
4. *Using*, yaitu tahapan yang melibatkan kemampuan serta keterampilan agar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6) juga mengemukakan terkait tahapan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, antara lain:

1. Penyeadaran

Tahap penyeadaran, yaitu masyarakat diberikan pengetahuan terkait dengan hak mereka untuk memiliki sesuatu. Penyeadaran dalam hal ini dapat dilakukan dari diri mereka sendiri. Hal yang dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat, antara lain dengan memberikan edukasi yang bersifat kognisi, *belief*, dan *healing*. Prinsip dasar yang terdapat dalam tahap ini, yaitu membuat masyarakat untuk mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses diberdayakan tersebut tentu berasal dari diri mereka terlebih dahulu.

2. Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan, yaitu berarti memampukan atau *capacity building*. Pembentukan kemampuan dilakukan setelah masyarakat diberikan kesadaran melalui edukasi dan masyarakat telah memahami, serta menerima daya yang akan diberikan dengan baik. Masyarakat diberikan daya sesuai dengan kemampuan individu atau kelompok sehingga dapat menerima kekuasaan atau daya yang diberikan.

3. Pendayaan

Tahap pendayaan, yaitu tahap terakhir dalam pemberdayaan masyarakat. Tahap pendayaan ini dilakukan dengan memberi daya, kekuasaan atau otoritas, hingga peluang kepada masyarakat sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki. Selain itu, diberikan akomodasi aspirasi dan diarahkan untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui berbagai macam tahapan sesuai dengan

kondisi dan keadaan masyarakat sebagai pihak yang diberikan daya. Tahapan pemberdayaan diawali dengan memahami masyarakat terlebih dahulu agar dapat mengetahui kondisi lingkungan untuk menyesuaikan pemberdayaan yang dijalankan. Kemudian, pemberdayaan dilakukan hingga tahap akhir agar tujuan untuk memandirikan masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang harus dilalui dengan beberapa tahapan agar masyarakat benar-benar dapat merasakan keberdayaan dan dampak positif. Pada dasarnya, pemberdayaan ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, seperti mandiri dalam berpikir dan bertindak. Pada penelitian ini, dalam melihat pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Rumah Harum di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok menggunakan teori dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto yang meliputi tahap Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayaan.

### **1.6.9 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat**

Keberhasilan suatu organisasi atau komunitas dalam pemberdayaan masyarakat tentu tidak dapat terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi. Nurazizah (2021: 8) mengemukakan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana dinilai sebagai aspek pendukung dalam realisasi suatu program atau kegiatan agar dapat dilakukan secara lebih maksimal.

Sarana dan prasarana selanjutnya dikatakan sebagai bentuk dukungan

karena dapat memperlancar dan menunjang kegiatan pemberdayaan, terutama melalui pengelolaan bank sampah yang di dalamnya terdapat pelatihan-pelatihan yang akan diberikan. Sarana dan prasarana tersebut dapat menjadi cara pengurus untuk mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

b. Keterlibatan masyarakat

Masyarakat yang terlibat dalam hal ini pengurus maupun nasabah dalam bank sampah menjadi bentuk motivasi agar masyarakat ikut serta dalam kegiatan yang ada dan dapat menjadi bentuk loyalitas yang diberikan kepada bank sampah. Hal lain yang dapat memperlancar kegiatan pengelolaan sampah, yaitu adanya semangat, keterampilan, dan kegigihan masyarakat atau nasabah bank sampah dalam proses pemberdayaan yang dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam membantu merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan berbagai program.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan lahan

Adanya keterbatasan lahan menjadi salah satu faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah karena hal tersebut menjadikan setiap kegiatan pemberdayaan dapat tertunda.

Anggraini, Noor, dan Said (dalam Tullatifah, 2020: 72) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat, yaitu:

## 1. Faktor Pendukung

### A. Faktor Internal

#### a) Keterlibatan anggota atau nasabah bank sampah

Keterlibatan anggota dapat dilihat dari beberapa nasabah bank sampah yang berpartisipasi secara penuh dan menerima menjadi bagian dari kegiatan yang telah ditentukan. Adanya nasabah bank sampah yang bersedia tersebut dapat membantu keberjalanan program pemberdayaan agar menjadi maksimal.

#### b) Sarana dan prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang memadai diharapkan menjadi penunjang keberjalanan pemberdayaan masyarakat dan dapat mengurangi hambatan-hambatan.

### B. Faktor Eksternal

#### a) Keterlibatan masyarakat sekitar

Keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat sekitar di luar anggota dapat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi keberjalanan pemberdayaan masyarakat. Adanya keterlibatan tersebut merupakan bentuk dukungan dari masyarakat dalam keberjalanan suatu program.

#### b) Kerja sama dengan pihak lain

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan atas dasar sosial tentu memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah, kerja

sama dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas penunjang untuk keberjalanan bank sampah.

## 2. Faktor Penghambat

### a) Ketidaksiplinan masyarakat atau nasabah bank sampah

Program pemberdayaan yang akan dilaksanakan dapat mengalami hambatan apabila masyarakat tidak memahami secara benar terkait prosedur yang ditentukan oleh bank sampah. Ketidaksiplinan tersebut merupakan bentuk tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditentukan.

### b) Pola pikir atau *mindset* yang kurang tepat

Pemikiran yang kurang terbuka terkait pengelolaan sampah serta program yang akan dijalankan oleh bank sampah menjadi penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan perubahan terhadap pemikiran masyarakat agar lebih peduli dan dapat tereduksi.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dari suatu pemberdayaan yang akan dilakukan kepada masyarakat bergantung pada kondisi masyarakat tersebut dan kondisi lingkungan sekitarnya. Pada penelitian ini, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Rumah Harum dapat dilihat dengan menggunakan pendapat dari Anggraini, Noor, dan Said (dalam Tullatifah, 2020: 72) yang terdiri dari aspek berikut:

## A. Faktor Pendukung

### 1. Keterlibatan nasabah bank sampah

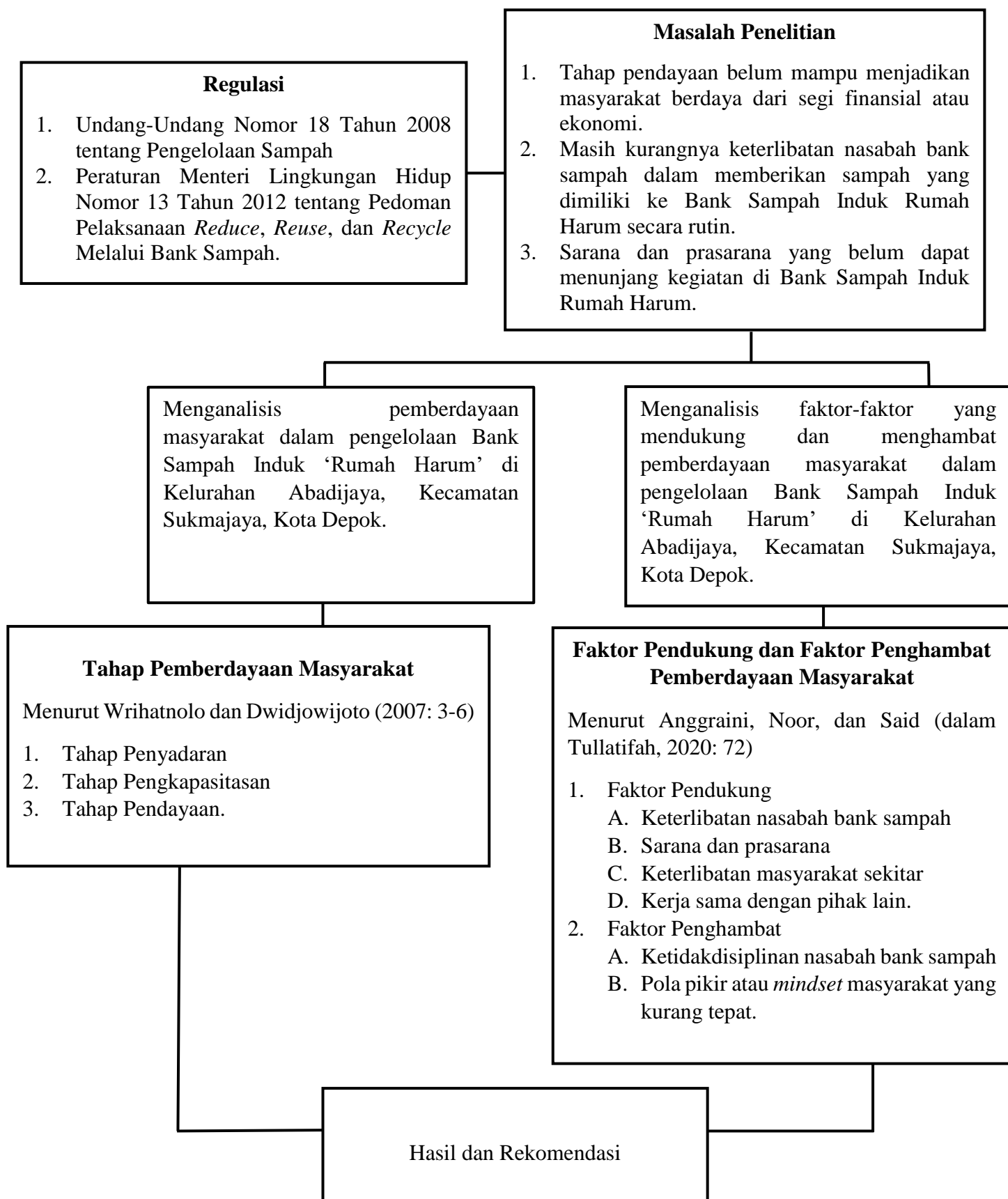
2. Sarana dan prasarana
3. Keterlibatan masyarakat sekitar
4. Kerja sama dengan pihak lain.

**B. Faktor Penghambat**

1. Ketidaksiplinan nasabah bank sampah
2. Pola pikir atau *mindset* masyarakat yang kurang tepat.



## 1.7 Kerangka Pikir Penelitian



## **1.8 Operasionalisasi Konsep**

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memberikan daya kepada masyarakat melalui pengembangan potensi, kemampuan, dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang bersifat berkelanjutan yang berguna untuk membantu pengelolaan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok melalui beberapa program yang terdapat di Bank Sampah Induk Rumah Harum. Di dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum, peneliti menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat serta faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengetahui dimensi dan indikator pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, peneliti mengadopsi pendapat dari Bella dkk., (2022) dengan memperhatikan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3-6) sebagai berikut:

### **1.8.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum**

#### **1. Tahap Penyadaran**

Tahap penyadaran merupakan tahap pertama dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat

bahwa masyarakat memiliki hak dan kemampuan sehingga perlu dibangun dan diberdayakan yang dapat dimulai dari diri mereka sendiri. Dalam menganalisis penyadaran masyarakat di Bank Sampah Induk Rumah Harum, fenomena yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan masyarakat untuk sadar.
2. Keinginan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan di bank sampah.
3. Sosialisasi oleh Pengurus Bank Sampah Induk Rumah Harum kepada masyarakat atau nasabah bank sampah.
4. Motif masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah.

## **2. Tahap Pengkapasitasan**

Tahap pengkapasitasan merupakan tahap untuk memberikan daya kepada masyarakat dalam mengelola dan menggali kemampuan yang dimiliki agar dapat lebih terampil serta mampu memperoleh peluang. Adapun fenomena yang dilihat pada pengkapasitasan ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam pengelolaan bank sampah yang dilakukan antara pengurus bank sampah dan nasabah bank sampah.
2. Pengembangan kemampuan atau kapasitas masyarakat melalui kegiatan bank sampah.

## **3. Tahap Pendayaan**

Tahap pendayaan merupakan tahap yang bertujuan untuk memberikan peluang kepada masyarakat melalui Bank Sampah Induk Rumah Harum agar dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sesuai

dengan minatnya. Dalam menganalisis pendayaan di Bank Sampah Induk Rumah Harum, fenomena yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan dalam memberikan kemampuan memilah sampah yang baik dan benar kepada masyarakat.
2. Peluang yang diberikan kepada masyarakat.
3. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui bank sampah.
4. Perubahan karakter.

### **1.8.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat**

#### **A. Faktor Pendukung**

1. Keterlibatan nasabah bank sampah
2. Sarana dan prasarana
3. Keterlibatan masyarakat sekitar
4. Kerja sama dengan pihak lain.

#### **B. Faktor Penghambat**

1. Ketidaksiplinan nasabah bank sampah
2. Pola pikir atau *mindset* masyarakat yang kurang tepat.

Adapun fenomena penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk ‘Rumah Harum’ di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Fenomena Penelitian**

<b>Fokus/ Tujuan</b>	<b>Fenomena</b>	<b>Gejala yang Diamati di Lapangan</b>
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Induk ‘Rumah Harum’ di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok	Tahap Penyadaran	Kemampuan masyarakat untuk sadar
		Keinginan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan di bank sampah
		Sosialisasi oleh Pengurus Bank Sampah Induk Rumah Harum
		Motif masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah
	Tahap Pengkapasitasan	Koordinasi dalam pengelolaan bank sampah
		Pengembangan kemampuan atau kapasitas masyarakat melalui kegiatan bank sampah
	Tahap Pendayaan	Kegiatan dalam memberikan kemampuan memilah sampah yang baik dan benar kepada masyarakat
		Peluang yang diberikan kepada masyarakat
		Peran <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) melalui bank sampah
		Perubahan karakter

Fokus/ Tujuan	Fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan
Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Induk 'Rumah Harum' di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok	Faktor Pendukung	Keterlibatan nasabah bank sampah
		Sarana dan prasarana
		Keterlibatan masyarakat sekitar
		Kerja sama dengan pihak lain
	Faktor Penghambat	Ketidakdisiplinan nasabah bank sampah
		Pola pikir atau <i>mindset</i> masyarakat yang kurang tepat

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023)

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena data hasil dari penelitian berkaitan dengan data yang ditemukan di lapangan penelitian dilakukan pada objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, serta kehadiran peneliti tidak memengaruhi dinamika pada objek tersebut. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar yang tidak menekankan pada angka. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lofland (dalam Moleong, 2012: 157) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif, yaitu kata-kata serta tindakan yang selebihnya terdapat data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.

Deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan banyak data mengenai hal yang diteliti kemudian digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan serta lebih berfokus pada proses dan makna. Pemilihan tipe penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku seseorang yang diamati sehingga penelitian ini dapat dibahas lebih dalam oleh peneliti terkait dengan peristiwa atau kondisi yang terdapat di lapangan.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian atau wilayah penelitian merupakan lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif merupakan studi yang berlangsung dalam situasi alamiah yang berarti bahwa peneliti tidak dapat melakukan manipulasi tempat penelitian. Situs penelitian ini adalah Bank Sampah Induk Rumah Harum yang

terletak di Jalan Merdeka Nomor 1, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau informan penelitian merupakan pihak yang memberikan informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Seorang informan harus terlibat secara langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam menentukan informan, harus melihat kompetensi dan kesesuaian dengan permasalahan yang sedang diteliti, tidak hanya sekadar menghadirkannya sehingga memilih metode yang tepat untuk digunakan dalam menentukan informan perlu diperhatikan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota yang dipilih menjadi sampel.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik *Purposive Sampling* dengan menentukan informan berdasarkan karakteristik tertentu dan mengabaikan yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan atau melalui pertimbangan bahwa narasumber memiliki pengetahuan yang dibutuhkan serta *Accidental Sampling*, yaitu dengan teknik penentuan sampel berdasarkan pertemuan yang tidak disengaja atau kebetulan sehingga peneliti dapat mengambil sampel pada siapa saja tanpa perencanaan sebelumnya (Sugiyono, 2009: 85). Dalam penelitian ini, terdapat beberapa informan sebagai berikut:

1. Informan 1: Kepala Kelurahan Abadijaya
2. Informan 2: Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum
3. Informan 3: Pengurus Bank Sampah Induk Rumah Harum



4. Informan 4: Anggota Bank Sampah Unit Barokah binaan Bank Sampah Induk Rumah Harum
5. Informan 5: Nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum (Menggunakan *Accidental Sampling*).

#### **1.9.4 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian kualitatif menurut Lofland (dalam Moleong, 2010: 157) meliputi kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, serta berbagai dokumen.

##### **1. Kata-Kata dan Tindakan**

Kata-kata dan tindakan menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Kata dan tindakan dalam hal ini diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan pada lokasi atau lokus penelitian. Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk 'Rumah Harum' di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

##### **2. Sumber Tertulis**

Sumber tertulis didapatkan dari buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah.

#### **1.9.5 Sumber Data**

Berdasarkan sumber data, penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dan sekunder dalam penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

Bank Sampah Induk ‘Rumah Harum’ di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dan diolah secara langsung oleh peneliti dari tempat penelitian dengan observasi dan wawancara mendalam kepada informan. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada informan melalui wawancara serta pengamatan secara langsung terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber secara langsung, seperti buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Data sekunder berperan sebagai data pendukung dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari laporan terkait pengelolaan sampah, bank sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, jurnal-jurnal, peraturan, dan dokumen lainnya.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016: 208), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada *setting* ilmiah atau *natural setting* dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik tersebut sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif guna aspek pengumpulan data, seperti data pribadi, catatan lapangan, ucapan, tindakan dari

responden, dan sebagainya. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Peneliti hanya dapat mengolah berdasarkan data yang diperoleh dari keadaan yang sebenarnya melalui observasi. Dalam observasi, peranan terpenting berada pada pengamat sehingga pengamat harus teliti terhadap setiap kejadian, gerak atau proses yang ada. Observasi yang peneliti lakukan, yaitu dengan mengamati pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum. Selain itu, mengamati terkait catatan lapangan, ucapan, dan tindakan dari masyarakat melalui pengelolaan Bank Sampah Induk Rumah Harum di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada informan agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara terstruktur karena peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara sebelum proses wawancara dilaksanakan, seperti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada informan yang relevan dengan topik penelitian

mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Induk 'Rumah Harum' di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dokumentasi yang dapat berupa catatan, agenda, rapat notulensi, gambar, buku, transkrip, dan sebagainya. Dokumentasi berawal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen umumnya dapat berupa gambar atau tulisan. Dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari dokumen, data, serta informasi dari mana saja yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen yang peneliti gunakan meliputi data timbulan sampah di Kota Depok, gambar bentuk kegiatan di bank sampah, serta produk yang dihasilkan dari sampah terpilah.

#### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan suatu proses menyusun dan mencari data secara sistematis yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi melalui pengorganisasian data berdasarkan kategori, kemudian menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan analisis, menyusun ke dalam pola dan memilah data-data yang diperlukan. Data yang telah dipelajari tersebut dibuat menjadi sebuah kesimpulan agar dapat dipahami oleh penulis dan orang lain (Sugiyono, 2016: 244). Analisis data bersifat induktif berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di

lapangan yang dilakukan dengan tujuan agar memperoleh data yang mendalam.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengumpulan Data dan Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan mencatat secara teliti dan terperinci terkait data yang diperoleh, kemudian dirangkum untuk dipilih hal yang memfokuskan pada yang penting dan pokok sehingga data yang direduksi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam melakukan pencarian serta pengumpulan data apabila diperlukan. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran dari hasil pengamatan sehingga mempermudah peneliti dalam meneliti permasalahan. Reduksi data merupakan pemilihan hal-hal pokok, mencari tema dan pola, memfokuskan pada hal-hal penting, proses merangkum, serta memisahkan yang tidak diperlukan. Tujuannya, yaitu untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama observasi data di lapangan berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan (Miles dan Huberman dalam Siyoto, 2015: 123). Pada tahap ini, peneliti berupaya untuk mengelompokkan data dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan dalam bentuk bagan, uraian singkat, grafik, tabel, *flowchart*, hubungan antar kategori, dan sebagainya.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

#### **1.9.8 Kualitas Data**

Kualitas data atau keabsahan data merupakan teknik pemeriksaan yang berdasarkan pada sejumlah kriteria yang mencakup derajat kepercayaan, ketergantungan, keteralihan, serta kepastian. Dalam penelitian kualitatif, kualitas data yang reliabel dan valid diperoleh dengan pengujian data. Data dikatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara hasil penelitian dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2016), untuk melakukan pengujian kualitas data atau keabsahan data maka dapat dilakukan dengan berbagai teknik melalui cara, sumber, dan waktu yang dimaksudkan agar memperoleh data yang teruji kredibilitasnya. Teknik tersebut dinamakan sebagai teknik triangulasi yang meliputi berbagai cara, sumber, dan waktu (Sugiyono, 2017: 273). Pada penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber untuk membuktikan keabsahan data. Triangulasi sumber merupakan teknik yang ditujukan untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Data yang telah dianalisis kemudian akan dilakukan *member check* dengan tiga sumber data.